

Irjen Pol Drs Sisno Adiwino

Keberhasilan Dicapai Karena Partisipasi Masyarakat

"POLRI MITRA MASYARAKAT". Inilah tema yang diangkat pada peringatan Hari Bhayangkara yang ke-61 tahun ini, serupa dengan tema tahun lalu. Mengapa masih bertema sama karena tema ini sangat relevan dengan perkembangan dan kondisi masyarakat dewasa ini. Tema ini juga yang melatarbelakangi keinginan masyarakat untuk melihat dan merasakan pelayanan Polri yang profesional dan dedikatif, serta dapat membantu, melayani dan mengatasi berbagai masalah terutama ketertiban, ketentraman, keamanan dan penegakkan hukum.

"Selain strategis, tema ini juga abadi. Lebih penting lagi karena memang itulah jati dirinya polisi. Polisi itu dari rakyat maka harus berbuat baik untuk rakyat pula. Sudah sejak lama masyarakat kita mendambakan polisi bisa tampil sebagai mitra dan pengayom yang senantiasa selalu berada di tengah-tengah aktivitas masyarakat," papar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Drs Sisno Adiwino, kepada *Jagrata* di Kalsel, 2 Juli lalu.

Hanya saja, keinginan melayani, mengayomi dan melindungi yang menjadi motto kepolisian ternyata tak semudah membalikkan telapak tangan ketika dilakoni. Dalam aplikasinya di lapangan, ditemukan beragam opini dari masyarakat, baik positif maupun negatif, yang seyogyanya harus ditanggapi dengan arif.

"Yang negatif kita *counter*. Yang positif itu yang terus kita tumbuh-kembangkan karena itulah yang kita harapkan. Dengan opini positif maka akan ada citra citra positif. Itu artinya ada kepercayaan dan itulah yang paling penting, kepercayaan. Kalau masyarakat sudah percaya pada polisi bahwa polisi adalah pelindung, pengayom dan pelayannya, dia akan berpartisipasi. Setelah berpartisipasi dia akan memberi dukungan. Itulah yang mau kita raih. Karena tanpa partisipasi dari masyarakat tak akan ada keberhasilan," papar Sisno Adiwino panjang lebar.

Sedangkan opini negatif, lanjut Sisno Adiwino, adalah yang berkaitan dengan

paradigma lama dimana figur polisi masih bergaya seperti militer. Yang model inilah yang harus terus dilakukan perubahan hingga kesan tersebut hilang dari ingatan masyarakat.

PATI MABES POLRI DISEBAR

Seperti halnya tahun lalu, tahun 2007 ini peringatan Hari Bhayangkara diselenggarakan di seluruh kesatuan kewilayahan mulai dari pusat yaitu Mabes Polri di Jakarta sampai ke daerah terpencil yaitu polsek di seluruh tanah air.

Untuk realisasi peringatan hari jadi Polri yang ke 61 ini diselenggarakan pada 2 Juli 2007. Penyelenggaraan diundur mengingat tanggal 1 Juli 2007 merupakan hari libur nasional. Untuk itu pelaksanaannya diawali dengan beberapa kegiatan kemasyarakatan antara lain lomba cerdas cermat kamtibmas, bhakti sosial, olahraga bersama, anjang sana, upacara dan syukuran.

Di peringatan Hari Bhayangkara tahun 2007 ini, pejabat utama dan fungsional Mabes Polri menjadi Inspektur upacara di kesatuan kesatuan Polsek di seluruh daerah di tanah air. Hal ini dilakukan agar keberadaan segenap pejabat utama/fungsional Mabes Polri di berbagai kesatuan wilayah bisa bertindak sebagai pengejawantahan adanya kemitraan yang konstruktif antar polisi dengan masyarakat, dengan harapannya dapat mengetahui, menangkap, merasakan dan memahami permasalahan Kamtibmas yang berkembang di wilayah setempat. Hal lainnya adalah agar mampu mendukung solusi pemecahannya di tingkat kesatuan kewilayahan dan Mabes Polri sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku.



DAFTAR PEJABAT TINGGI MABES POLRI YANG MENJADI INSPEKTUR UPACARA DI KESATUAN –KESATUAN POLSEK:

NO	NAMA	IRUP		POLDA, POLWIL/TABES, POLRES, POLSEK/TA
		PANGKAT	JABATAN	
1.	Drs. Sutanto	Jenderal Polisi	Kapolri	Polda Kalimantan selatan
2.	Drs. R. Makbul Padmanagara	Komisaris Jenderal Polisi	Wakapolri	Lapangan bhayangkara Mabes polri
3.	Drs. H.M Guntur ariadi, M.si	Brigadir Jenderal Polisi	Karo Binops sdeops Polri	Polsek pangkalan susu Polres langkat Polda Sumatera utara
4.	Drs. J. Sriyono, M.B	Brigadir jenderal polisi	Karo dalpers sdm polri	Polsek adkenopan Polres labuhan ratu Polda sumut
5.	Drs. Torkis p. Stahaan	Brigadir jenderal polisi	Widyaiswara madya bid	Polsek balige Polres tapanuli utara Polda sumut
6.	Drs. Sitompul, smik	Brigadir jenderal polisi	Kewarganegaraan lemhannas	
7.	Drs. Sunaryono s.h	Brigadir jenderal polisi	Karo binops pns sdeops polri	Polsek Phan Jahe Polres tapanuli utara Polda sumut
8.	Drs. Yose rizal m si	Brigadir jenderal polisi	Dir b baintelkam polri	Polsek Percut Seituan Poltabes medan Polda sumut
9.	Drs. Mayestika madjid	Brigadir jenderal polisi	Asdep/ v kementerian polhukam	Polsek Bagan Jiapi-api Polres rokan hilir Polda Riau
10.	Drs. Susno dijadi s.h	Inspektur jenderal polisi	Waka ppatk bid huk dan kal ppatk	Polsek Dempo Selatan Polres rokan hilir Polda riau
11.	Drs. Supardi	Inspektur jenderal polisi	Kadivtelematika polri	Polsek Prabu Mulih Timur Polres Prabu mulih Polda Sumatera Selatan
12.	Drs. Jasir karwita s.h	Brigadir jenderal polisi	Karo renmin baintelkam polri	Polsek Tanjung Raja Polres Oki Kayu Agung Polda Sumatera Selatan
13.	Drs. Fernal manaf	Brigadir jenderal polisi	Karo analisis baintelkam polri	Polsek Sungai Lilin Polres Muba Polda Sumatera Selatan
14.	Drs. H. Yuzwar arsyad	Brigadir jenderal polisi	Dir bindik lemdiklat polri	Polsek Bukit Kemuning Polres Lampung Utara Polda Lampung
15.	Drs. R. Nata kesuma	Brigadir jenderal polisi	Kapudalops sdeops polri	Polsekta panjang Poltabes bandar lampung Polda lampung
16.	Drs. D.p.m sitompul sh, mh	Inspektur jenderal polisi	Gubatur ptk	Polsek taman puring Polres jakarta selatan Polda metro jaya
17.	Drs. Sumiarto sudarmo	Brigadir jenderal polisi	Dir b baintelkam polri	Polsek metro duren sawit Polres metro jakarta timur Polda metro jaya
18.	Drs. Sutisna	Brigadir jenderal polisi	Karo um lemhannas	Polsek tambun Polres bekasi Polda metro jaya
19.	Drs. H. Ramli darwis	Brigadir jenderal polisi	Kapudident bareskrim polri	Polsek Metro Bekasi Polres Bekasi Polda Metro Jaya
20.	Drs. Iskandar hasan	Brigadir jenderal polisi	Seis ncbi interpol Indonesia	Polsek Cileduk Polres Tangerang Polda Metro Jaya
21.	Drs. Wenny warouw	Brigadir jenderal polisi	Dir ii ekonomi dan khusus bareskrim polri	Polsek Pondok Aren Polres Tangerang Polda Metro Jaya
22.	Drs. Firman gani	Inspektur jenderal polisi	Kasespim polri	Polsek Cisarua Polres Cimahi Polda Jabar
23.	Drs. H.r.abubakar nataprawira, sh	Inspektur jenderal polisi	Deputi pengembangan wantannas	Polsek Lengong Polres Bandung Tengah Polda Jabar
24.	Drs. Momon rusmana sh	Brigadir jenderal polisi	Karo jianstra sdeops polri	Polsekta Indhiang Polresta Tasikmalaya Polda Bawa Barat
25.	Drs. Sutigno soebrata	Brigadir jenderal polisi	Inspektur lemhannas	Polsekta Cirebon Utara Polresta Cirebon Polda Jawa Barat
26.	Drs. Dudung subada sh	Brigadir jenderal polisi	Dir a baintelkam polri	Polsek Rajagaluh Polres Majalengka Polda Jawa Barat
27.	Drs. Henry syafuddin hs, mm	Brigadir jenderal polisi	Karo jianstra sdelog polri	Polsek Beber Polres Cirebon Polda Jawa Barat
28.	Drs. Imam widjono sh, mm	Brigadir jenderal polisi	Karo bekum sdelog polri	Polsekta Coblong Polresta Bandung Tengah Polda Jawa Barat
29.	Drs. Dikdik m. Arief mansur sh, mh	Brigadir jenderal polisi	Karo renmin baintelkam polri	Polsek Limbangan Polres Garut Polda Jawa Barat
30.	Drs. Adang rochjana	Brigadir jenderal polisi	Karo ortala sderenbang polri	Polsek Cimalaka Polres Sumedang Polda Jawa Barat
31.	Drs. Taufik rdha, mm	Brigadir jenderal polisi	Irwil iir itwasum polri	Polsek Kadunggora Polres Garut Polda Jawa Barat
32.	Drs. Dedy suardy	Inspektur jenderal polisi	Wakababinkam polri	Polsek Tegai Timur Polres Tegal Polda Jawa Tengah
33.	Dr. Teguh soedarsono	Inspektur jenderal polisi	Kadivbinkum polri	Polsek Patik Raja Polres Banyumas Polda Jawa Tengah
34.	Drs. T. Ashikin inanto	Inspektur jenderal polisi	Gebemur akpol	Polsek Slawi Polres Tegal Polda Jateng
35.	Drs. Hasyim inanto	Brigadir jenderal polisi	Kapuskomtek divitelematika polri	Polsekta Pasar Kliwon Poltabes Solo Polda Jawa Tengah
36.	Drs. Bambang ekolji, sh	Brigadir jenderal polisi	Kapus bin prof div propam polri	Polsek Pecangan Polres Jepara Polda Jawa Tengah
37.	Drs. Tukarno	Brigadir jenderal polisi	Dir vtipiter bareskrim polri	Polsek Ketandan Polres Klaten Polda Jawa Tengah
38.	F.a Purwokoh, sh, msi	Brigadir jenderal polisi	Pati sahlil kapolri	Polsek Tegal Rejo Polres Magelang Polda Jawa Tengah
39.	Drs. Bambang sutrisno, sh	Brigadir jenderal polisi	Pati sahlil kapolri	Polsek Aji Barang Polres Magelang Polda Jawa Tengah
40.	Drs. Salah saaf	Inspektur jenderal polisi	Kabaintelkam polri	Polres Sleman Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
41.	Drs. Yudi susharyanto, sh	Brigadir jenderal polisi	Dir lantas polri	Polsek Gondokusuman Polresta Jogjakarta Polda D.I.Y
42.	Drs. Bambang hadiono, mm	Inspektur jenderal polisi	De sdm polri	Polsek Trawas Polres Mojokerto Polda Jawa Timur
43.	Drs. Wahyono	Brigadir jenderal polisi	Waka baintelkam polri	Polsek Sukun Polresta Malang Polda Jawa Timur
44.	Drs. Rubani pranoto, mba	Inspektur jenderal polisi	Widyaiswara utama lemhannas	Polsekta Pare Polres Kediri Polda Jawa Timur
45.	Drs. Rivaid sahidu, sh	Brigadir jenderal polisi	Kapus iknas div telematika polri	Polsek Waru Polres Pamekasan Polda Jawa Timur
46.	Drs. M. Ibrahim, sh, mh	Brigadir jenderal polisi	Ka secapa polri	Polsek Brebek Polres Nganjuk Polda Jawa Timur
47.	Drs. Sudirman	Brigadir jenderal polisi	Dir c baintelkam polri	Polsek Maesan Polres Bondowoso Polda Jawa Timur
48.	Drs. A. Bambang suedi	Brigadir jenderal polisi	Dir samapta polri	Polsek Boyolangu Polres Tulung Agung Polda Jawa Timur
49.	Drs. Mudji waluyo, sh, mm	Brigadir jenderal polisi	Kapusduk cegah lakhar bin	Polsek Pakis Polres Kepanjen Malang Polda Jawa Timur
50.	Drs. Hadjar pumawarman	Brigadir jenderal polisi	Irwil iir itwasum polri	Polsek Nglames Polres Madiun Polda Jawa Timur
51.	Drs. Budi gunawan, sh, msi	Brigadir jenderal polisi	Kaselapa polri	Polsek Trowulan Polres Mojokerto Polda Jawa Timur
52.	Drs. Made manqku pastika	Komisaris jenderal polisi	Kalakhar bin	Polsek Gerokgak Polres Buleleng Polda Bali
53.	Drs. I. Nengah sutisna, mba	Brigadir jenderal polisi	Direktur polair polri	Polsek Tejakula Polres Buleleng Polda Bali
54.	Drs. Suhardi sigit	Brigadir jenderal polisi	Karo binkar polri	Polsek Sejangkung Polres Sambas Polda Kalbar
55.	Drs. Abdurachman	Brigadir jenderal polisi	Kapusprov divpropam polri	Polsek Nanga Suhaid Polres Kapuas Hulu Polda Kalimantan Barat
56.	Drs. Boedhi santoso	Brigadir jenderal polisi	Karo jianstra sdm polri	Polsek Paloh Polres Sambas Polda Kalimantan Barat
57.	Drs. Arie soebowo	Brigadir jenderal polisi	Dir iii ptkor wvc areskrim polri	Polsek Siantan Poltabes Pontianak Polda Kalimantan Barat
58.	Drs. S.y. Wenas	Inspektur jenderal polisi	Kakorbnmob polri	Polsek Tarakan Barat Polres Tarakan Polda Kalimantan Timur
59.	Drs. Syamsurizdal	Brigadir jenderal polisi	Karoren dan ku settama lemhannas	Polsek Padang Batung Polres Hulu Sungai Selatan Polda Kalsel
60.	Drs. R. Koenarto, sh	Brigadir jenderal polisi	Irwil ii itwasum polri	Polsek Pulau Laut Utara Polres Kota Baru Polda Kalimantan Selatan
61.	Drs. Dadang amida	Komisaris jenderal polisi	Sektama lemhannas	Polres Barito Selatan Polda Kalimantan Tengah
62.	Drs. Jusuf mangga barani	Komisaris jenderal polisi	Irwasum polri	Polsek Kaimas Pulau Dewakang Polres Pangkep Polda Sulsel
63.	Drs. H. Mardito, sh, mh	Inspektur jenderal polisi	Widyaiswara utama lemhannas	Polsek Mamuju Polres Mamuju Polda Sulawesi Selatan
64.	Drs. M. Ruslan riza	Brigadir jenderal polisi	Kapus labior bareskrim polri	Polsek Malua/Baraka Polres Enrekang Polda Sulawesi Selatan
65.	Drs. Mathius salempang	Brigadir jenderal polisi	Karo analisis bareskrim polri	Polsek Rantipao Polres Tanah Toraja Polda Sulawesi Selatan
66.	Dr. M. Aidy rawas	Brigadir jenderal polisi	Ka rumkit polpus rs. Sukantopusdokes polri	Polsek Banawa Polres Donggala Polda Sulawesi Tenggara
67.	Drs. A. Gordon mogot, msi	Inspektur jenderal polisi	Kadiv propam polri	Polsek Ratahan Polres Minahasa Selatan Polda Sulawesi Utara
68.	Drs. Harry montolaku, mm	Brigadir jenderal polisi	Asdep v/ urusan intel a dan	Polsek Kakas Polres Minahasa Polda Sulawesi Utara
			Kermakam dep. V / karnas polhukam	
69.	Drs. Sunamo	Brigadir jenderal polisi	Karo jakstra sderenbang polri	Polsek Atapupu Polres Belu Polda Nusa Tenggara Timur
70.	Alex bambang riatmodjo	Inspektur jenderal polisi	Deputi menkopolhukam bid komin	Polsek Salahulu Polres Ambon dan PP. Lase Polda Maluku
71.	Drs. E. Winarto h, sh, msi	Inspektur jenderal polisi	Koorsahlil kapolri	Polsek Kuala Kencana Polres Mimika Polda Papua
72.	Drs. E. H. Allagan, sh	Brigadir jenderal polisi	Kapus jak kmla bakorkamla	Polsek Merauke Kota Polres Merauke Polda Papua
73.	Drs. Edward r. Pakasi	Brigadir jenderal polisi	Karo progat sderenbang polri	Polsek Monokwari Kota Polres Manokwari Polda Papua
74.	Drs. H. Syamsudin djafar	Brigadir jenderal polisi	Karo binjah sde sdm polri	Polsek Labuan/Carita Polres Pandeglang Polda Banten
75.	Drs. Busri jaran	Brigadir jenderal polisi	Widyaiswara madya ideologi lemhannas	Polsek sungai liat Polres bangka Polda bangka Belitung
76.	Drs. Irawan sumarno	Brigadir jenderal polisi	Dir jiansosbud dejian lemhannas	Polsek Tanjung Pandan Polres Belitung Barat Polda Bangka Belitung
77.	Drs. Andi masmiyat	Brigadir jenderal polisi	Staf ahli kapolri bid sosek	Polsek Singkep Barat Polres Linggi Polda Kepri
78.	Drs. Hendy	Brigadir jenderal polisi	Karo bangpers sdm polri	Polsek Tanjung Uban Polres Kepri Timur/Tanjung Pinang Polda Kepri

KESAN TAK TERLUPAKAN

■ Brigjen Pol Drs Halba R Nugroho Kapolda Kalsel

PENUNJUKAN Kalsel sebagai tempat upacara puncak HUT Bhayangkara ke 61 oleh Kapolri merupakan sebuah bentuk penghargaan bagi kami, Polda Kalsel dan seluruh masyarakat Kalsel. Tentu kami merasa bangga dari 21 Polda yang ada di Indonesia, Polda kalsel yang dipilih. Ini sebuah kebanggaan dan penghargaan bagi polda dan rakyat kalsel. Bukan hanya pada polisi tapi juga pada masyarakat Kalsel yang dilihat sebagai masyarakat yang aktif berpartisipasi pada polisi. Bayangkan, pemimpin polisi tertinggi hadir di sini, sebuah momen penting yang sangat langka.

Kalau dua tahun sebelumnya upacara dipusatkan Jakarta bersama presiden, sekarang sesuai kebijakan bapak kapolri, cukup dilaksanakan di Polsek-Polsek saja supaya kita ini lebih membumi, turun ke bawah. Sebagai mitra masyarakat. Polsek adalah tempat pelaporan yang pertama. Jadi semua kehidupan masyarakat dan individu ada di polsek bukan di mabes. Dan menjadikan polsek sebagai tempat upacara puncak HUT Bhayangkara merupakan langkah tepat dalam rangka berada lebih dekat dengan masyarakat sehingga polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat

terwujud.

Memulainya ya dari satuan polisi terdepan, dari Polsek. Maka di seluruh Polsek yang ada di Indonesia HUT Bhayangkara akan dipimpin oleh jenderal-jenderal dan pejabat tinggi dari Mabes. Sebuah kebahagiaan bagi anggota dan masyarakat karena bisa bertatap muka langsung dengan sosok yang mungkin hanya terlihat gambar - DHARMA - WASPADA nya di televisi.



FOTO: JIJEVA HARTINI

■ **Kombes Pol Drs Condro Kirono MM** Ketua Panitia HUT/Dirlantas Polda Kalsel

SATU hal yang membuat kami tidak ingin kita melakukan pengamanan yang berlebihan. Pesannya, kedatangannya beliau jangan sampai mengganggu masyarakat. Apalagi membebani masyarakat. Tak perlu ada bunyi sirene-sirenean. Saya juga wanti-wanti pada anggota, kalian boleh bangga mengamankan pimpinan tapi jangan kemudian masyarakat di jalan yang dipinggirkan.

Kami juga tidak mengundang pejabat, satuan lain atau di atas Polsek. Tujuannya jelas, kapolri jauh-jauh datang kemari ingin bertatap muka dan

berdialog langsung dengan masyarakat Banjarbaru. Kalau kita



FOTO:JT/EVAHARTINI

undang pejabat malah akan mengganggu tujuan awal. Akhirnya makna kesederhanaan dan

upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan satuan polisi terdapat tidak akan mencapai tujuan. Denyut nadi kehidupan masyarakat itu berada di Polsek. Jadi polisi lah yang mendekat ke masyarakat. Kalau dulu upacara dipusatkan di Jakarta dengan megah tapi hampa.

Tak bermakna bagi kita dan terutama bagi masyarakat.

Dan Alhamdulillah semua berakhir baik dan lancar karena perencanaan yang baik sejak tanggal 1 sampai 30 Juni. Saya sebagai ketua panitia, berikut semua seksi-seksi yang bekerja dan melakukan persiapan selama satu bulan tentu berlega hati. Ini bukti bahwa dengan perencanaan dan kepanitiaan yang baik, *well plan, well organize* dan dukungan seluruh masyarakat Kalsel Insya Allah semua lancar.

■ **Kombes Pol Drs Wahyu Adi SH** Wakil Ketua HUT/Direskrim Polda Kalsel

KALAU ditanya bagaimana perasaan saya ya tentu saja bangga lah. Tapi kalau ditanya bagaimana sistem keamanannya ya tentu saja berbeda dengan hari biasa. Paling tidak ada penambahan personel di titik-titik yang rawan. Tapi penting sebagai catatan kita harus selalu siap dan siaga dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Hal itu wajib dilakukan oleh satuan dan wilayah manapun baik ada atau tanpa ada kapolri. Tentang

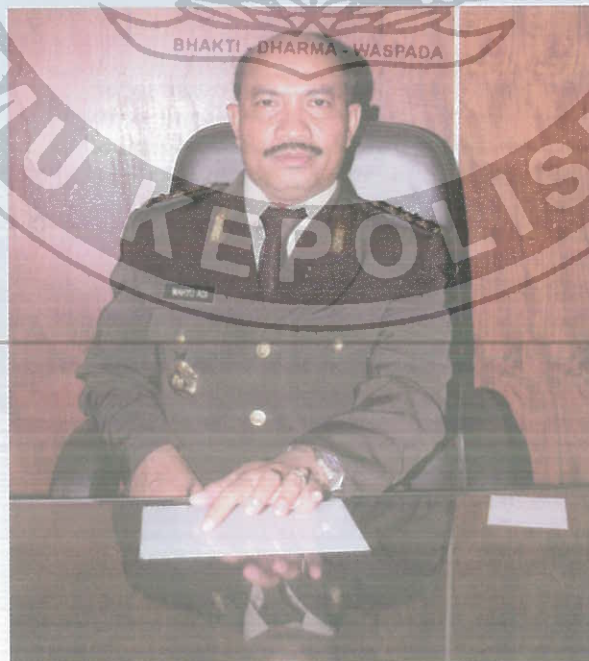


FOTO:JT/EVAHARTINI

penunjukan Kalsel sebagai tempat kapolri melaksanakan upacara puncak HUT Bhayangkara merupakan momen penting tidak saja bagi jajaran polisi di Kalsel tapi juga masyarakat Kalsel untuk bertatap atau mungkin berdialog langsung dengan kapolri.

Saya berharap momen seperti ini terus berulang setiap tahun sehingga kemitraan polisi dengan masyarakat seperti yang sama-sama kita inginkan berjalan dengan baik.

FOTO: JI'VEA HARTINI



■ Kombes Pol Drs Arkhian Dir Intel Polda Kalsel

SAYA merasa lega dan tenang bisa melalui pekerjaan ini dengan baik, aman dan lancar. Sesuai dengan harapan kami, akhirnya kapolri bisa berdialog dengan kita semua dan akhirnya kembali ke Jakarta dengan aman. Alhamdulillah, ini merupakan anugerah dan juga kerja keras anggota-anggota saya. Begitu kapolri *take-off* saya langsung mengirim pesan singkat lewat SMS ke anggota-anggota saya.

Saya bilang bapak kapolri sudah *take off*. Terima kasih karena kalian sudah bekerja dengan baik. Mereka jawab, siap ndan. Itulah kebiasaan yang selalu saya lakukan sekuat menyelesaikan pekerjaan. Sapaan ini penting dilakukan supaya anggota merasa dihargai pekerjaannya karena ikut berperan. Dalam pengarahannya, Kapolda berpesan jangan sampai ada unjuk rasa. Karena sekecil apapun

sekupnya, sekecil apapun masalahnya, bisa dijadikan "ikon" opini sehingga melupakan hal-hal baik yang sudah dilakukan polisi.

Untunglah berkat pendekatan kami yang sangat....sangat persuasif, dua LSM, yang satu kecil satunya lagi agak besar karena gabungan, yang berencana unjuk rasa menyangkut kasus korupsi di bandara berhasil kami amankan. Mereka dengan penuh kesadaran mengundurkan waktunya dua hari setelah HUT Bhayangkara. Saya bilang, tolonglah *mbok* ya sekali-sekali kami ini polisi jangan diganggu dulu pada saat kami berulang tahun. Dan syukurlah mereka mau mengerti. Pengertian ini bagi saya juga merupakan sebuah bentuk kemitraan kami dengan masyarakat.

■ Drs Rudy Resnawan (Walikota Banjarbaru)

MOMEN ini bagus sekali untuk mengubah paradigma lama Polri menjadi Polri yang sama-sama baru sesuai dengan harapan kita semua. Menjadi polisi yang benar-benar ada di hati masyarakat, bukan lagi menjadi sosok yang ditakuti tapi disegani, sekaligus menjadi teman dan sahabat. Kehadiran Bapak kapolri di tempat seperti ini tentu merupakan sebuah kesempatan yang jarang bisa ditemui. Baik oleh jajaran polisi itu sendiri maupun masyarakat. Jadi kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan oleh kita semua.

Tentang potret kepolisian itu sendiri Alhamdulillah selama saya jadi walikota Banjarbaru kinerja kepolisian khususnya di Banjarbaru ini relatif bagus. Ukurannya apa? Polisi sudah banyak memberikan

suatu kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatannya juga sangat berbeda dengan sebelumnya. Karena paradigma dari kepolisian dulu dan sekarang saya rasakan memang berbeda sekali.

Adanya perubahan paradigma itu sangat terasa sekali oleh masyarakat kita. Dan tentu harapan kita ke depan bahwa ini adalah suatu proses perubahan paradigma. Hanya saja, sebuah perubahan tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Perlu proses. Tentunya jangan hanya pihak kepolisian yang berkeinginan tapi masyarakat juga harus ikut membantu, berupa dukungan terhadap perubahan tersebut. ***



FOTO: JI'VEA HARTINI

AKP Bahruddin Tampubulon

LEGA SETELAH HAJAT USAI



FOTO: JTEVA HARTINI

agar kantor terlihat lebih bersih.

"Saya kira ini tidak terlalu berlebihan karena siapapun akan melakukan itu. Yang akan datang kan Kapolri, pimpinan Polri paling tinggi, jadi sangat manusiawi kalau kita memberi penyambutan yang sempurna," tukasnya seraya menegaskan penunjukan itu identik dengan kepercayaan yang harus dijalankan dengan baik.

Mengikuti upacara HUT Bhayangkara dengan instruktur upacara kapolri adalah anugerah yang harus disambut dengan suka cita dan kebanggaan. Momen ini merupakan kesempatan yang sangat langka karena belum tentu ada di masa mendatang. Begitu kata Tampubulon menirukan pesan kapolda.

"Kami berupaya agar Bapak Kapolri berkenan atas apa yang telah kami lakukan ini. Kami, warga Banjarbaru berterima kasih karena beliau berkenan hadir di sini," ucap Tampubulon penuh kebanggaan se-

raya bersyukur karena "hajjat" itu berlalu dengan sukses. Kecemasan, bahkan tidak bisa tidur nyenyak saat persiapan akhirnya berlalu dengan penuh kelegaan.

"Semua ini tentu juga berkat karunia Yang Di Atas," kata Tampubulon yang memiliki motto hidup "jalani hidup seperti air mengalir" dan motto tugas "sederhana, ramah dan ringan langkah" dan "tidak bikin ulah".

Dengan motto melayani masyarakat dengan keramahan, dengan langkah silaturahmi, tidak bikin ulah dan tidak mencari-cari persoalan, maka selama itu pun tugas yang diembannya sebagai kapolsek sementara ini berjalan baik. "Inilah yang selalu saya tekankan kepada anggota saya. Kalau memang ada persoalan, ada pengaduan masyarakat, terimalah dengan cepat, tangani lah secara cepat dan selesaikan dengan cepat". Begitu katanya. [cil]

TAK ada rasa lain selain bangga. Itulah yang dirasakan Kapolsek Banjarbaru, AKP Bahruddin Tampubulon ketika polseknya ditunjuk jadi tempat upacara puncak memperingati HUT Bhayangkara ke-61 pada 2 Juli lalu. Tambah bangga lagi, karena dia pun jadi komandan upacara yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol Drs Sutanto itu. "Ini merupakan sebuah tantangan sekaligus kebanggaan bagi seluruh jajaran anggota Polsek Banjarbaru," tukasnya.

Maka, sejak pemberitahuan pada awal Juni, dia pun segera mengajak anggotanya untuk bersiap-siap. Dimulai dari membersihkan kantor, memperbaiki bagian-bagian yang rusak, dan mempersiapkan lapangan di depan kantor Polsek yang akan digunakan untuk upacara.

Asrama yang selama ini menjadi tempat tinggal para anggotanya pun tak luput dari sentuhan, minimal dibuat lebih bersih dari biasanya agar enak dan nyaman bila tiba-tiba ditengok oleh kapolri. Mengganti lantai ubin kantor Polsek dengan keramik pun dilakukan



FOTO: JTEVA HARTINI

RS Bhayangkara Banjarmasin

GRATIS BAGI PASIEN BENAR-BENAR TAK MAMPU

HIDUP dan pengabdian merupakan dua kata yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia manapun. Dalam lingkup kecil seperti rumahtangga, agar hidupnya harmonis, suami dan isteri saling mengabdikan bagi pasangannya. Sedangkan bagi Polri, arti pengabdian begitu luas, yaitu kemampuan untuk mengayomi, melindungi dan memberi pelayanan bagi masyarakat.

Dalam rangka itu pula tujuan dari pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin, yang pengoperasionalnya diresmikan oleh kapolri Jenderal Pol Drs Sutanto SH 2 Juli 2007 lalu, se usai memimpin upacara puncak HUT Bhayangkara ke - 61 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rumah Sakit kepolsian yang dibangun oleh polda kalteng tersebut diharapkan mampu menjawab keluhan tidak saja dari keluarga besar Polri tapi

juga masyarakat umum yang memerlukan bantuan pengobatan.

Lebih khusus dari itu, pembangunan rumah sakit ini juga merupakan tindak lanjut dari surat kapolri No Pol B/663/III/2006/Pusdokkes tertanggal 22 maret 2006 tentang Penunjukan RS Bhayangkara Tingkat IV Banjarmasin sebagai pilot Project Percontohan Pelayanan Prima di RS Bhayangkara.

Artinya, rumah sakit ini menjadi rumah sakit percontohan bagi rumah sakit sejenis agar memberikan pelayanan prima bukan saja pada keluarga polisi tapi juga masyarakat umum. Bukan itu saja, bagi pasien manapun yang berasal dari keluarga tidak mampu tapi benar-benar memerlukan pertolongan tetap akan dilayani dengan baik. Itu semua dilakukan sebagai wujud dari pengabdian Polri bagi masyarakat. "Silakan, kita akan gratiskan bagi yang memang tidak mampu

bayar. Kalau perlu pulang kita kasih ongkos," tandas Kapolda Kalteng Brigjen Pol Drs Halba R Nugroho pada saat peresmian.

Lebih lanjut kapolda menegaskan, apa-apa yang diucapkannya bukan sekedar di mulut, tapi sungguh lahir dari keikhlasan hati yang paling dalam. "Demi Allah, kami, seluruh jajaran dan juga saya tegaskan pada Kabid Dokkes Polda untuk berbuat dan berjuang yang terbaik bagi masyarakat," tandasnya, yang langsung mendapat *applause* dari segenap yang hadir di peresmian, termasuk kapolri Jenderal Pol Drs Sutanto.

FASILITAS LENGKAP

Untuk memberi pelayanan yang prima, RS Bhayangkara dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang cukup lengkap. Ada poli umum, poli gigi, instalasi gawat darurat, poli penyakit dalam, kebidanan dan kandungan dengan teknologi USG empat dimensi, bedah, penyakit anak dan *medical check up*.

Sarana untuk pemeriksaan penunjang medis juga lengkap di antaranya roentgen, laboratorium klinik, USG, EKG, Tred Mill Test serta apotik yang buka 24 jam. "Jadi kalau ada pasien yang perlu di *rontgen* atau lainnya yang sejenis cukup dilakukan di sini, tak perlu di rumah sakit lain," terang Kepala Dokkes RS Bhayangkara AKBP dr TB Rijanto Dim seraya menambahkan untuk penangan dan pemeriksaan spesialis lainnya pihaknya bekerjasama dengan dokter-dokter ahli dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin. [cil]

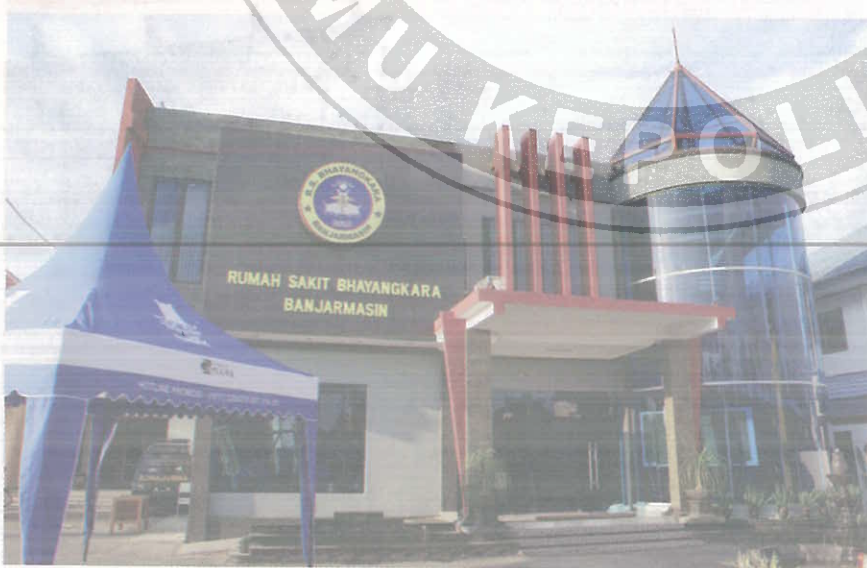


FOTO: JIJEVA HARTINI

Ruang Jagratara Sumbagsih Orang "Jete"



FOTO:JT/EVA HARTINI

DIMANA kita mengabdikan, atau untuk siapa kita mengabdikan, tak terlalu penting dipertanyakan. Tapi bermanfaat apa tidak pengabdian kita, nah itu yang terpenting. Dan jawabannya, ada pada orang-orang "Jete" (Jete, singkatan dari Jagratara, nama sebuah batalyon para siswa Akpol '84, red) berikut ini.

Atas nama pengabdian juga, bila kemudian tujuh pejabat "Jete" yang menduduki posisi-posisi strategis di Polda Kalimantan Selatan kolektif mengumpulkan dana untuk kepentingan melayani orang sakit, yang berwujud pada nama sebuah ruangan perawatan. Namanya tentu saja Jagratara.

Selain Jagratara, ruang perawatan lainnya yang ada di dalam rumah sakit Polri Bhayangkara adalah ruang Athidira dan ruang Utama. Ruang Jagratara memiliki fasilitas dua *bed* pasien, AC, televisi 21" (TV kabel 40 channel), dispenser *hot and cool* dan kamar mandi yang dilengkapi *shower*.

Tujuh pejabat tersebut adalah Kombes Pol Drs Wahyu Adi SH (Dirreskrim), Kombes Pol Drs Condro Kirono (Dir Lantas), Kombes Pol Drs Arkhian Lubis (Dir Intel), Kombes Pol Drs Sukirman (Dir Narkoba), Kombes Pol Drs Sutrisno (Irbin

Itwasda) dan Kombes Pol Drs Marisan (Dir telematika).

Menurut mereka, seperti diwakili Kombes Pol Drs Wahyuadi, tak penting menyebut jumlah nominal yang disumbangkan. Tapi yang pasti keinginan untuk berbuat dan mengabdikan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan bisa terlaksana.

"Ruang itu dibangun berdasarkan komitmen dan dedikasi kami saja karena sesungguhnya kita memang tak ada anggaran secara utuh," jelas Wahyu Adi, seraya memberi penegasan bahwa kalau hanya berdasarkan komitmen tak akan berjalan tanpa ada dedikasi. "Untuk itu saya bersyukur teman-teman di sini selain punya komitmen juga memiliki dedikasi yang tinggi sehingga inilah hasilnya," tambah Wahyu Adi sambil memperlihatkan isi ruang Jagratara. [cil]



FOTO:JT/EVA HARTINI

POLRI DALAM RAGAM

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada 1 Juli 2007 menggenapi usianya yang ke-61 tahun. Sebuah usia yang relatif panjang, dengan banyak pengalaman dalam perjalanannya. Layaknya perjalanan sejarah yang dinamis, Polri telah melalui masa-masa yang diwarnai pasang-surut, baik dalam eksistensi dan perannya sebagai aparat negara maupun dalam citra kehadirannya di tengah-tengah masyarakat sebagai penegak hukum dan pengayom.

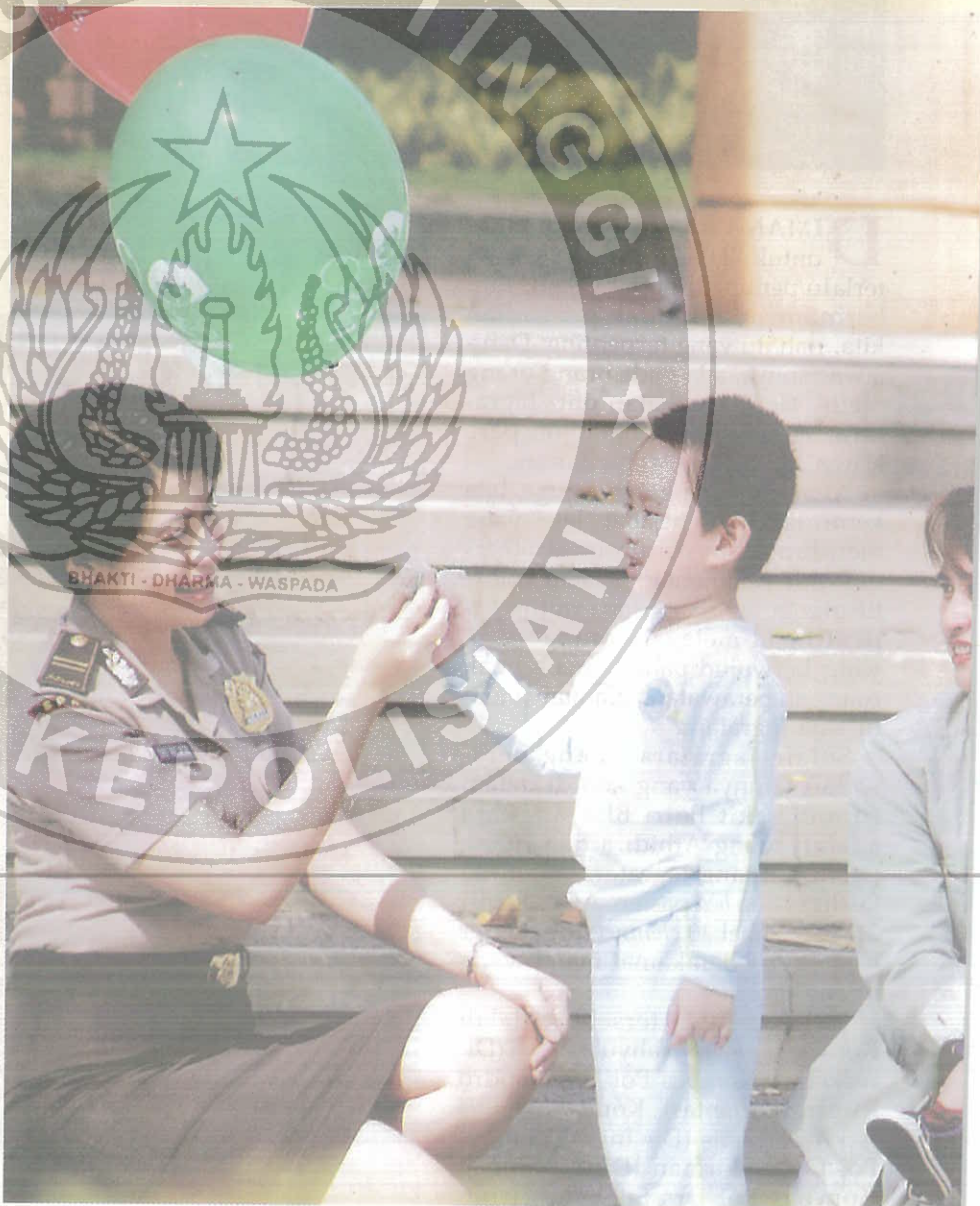
MEMBICARAKAN Polri hari ini, perlu mengkaitkannya dengan harapan di masa depan, seraya selalu belajar dan bercermin pada masa lalu. Dalam perspektif mantan Kapolri Jenderal Polisi Prof Dr (Purn) Dr Awaloedin Djamin MPA, orang harus tahu sejarah Polri, karena tanpa mengetahuinya akan tidak mengerti kenapa kepolisian menjadi seperti sekarang. "Barulah setelah itu kita bicara mengenai tekad untuk reformasi Polri yang dimulai pada tahun 1998," katanya.

Pada tahun 1998, setelah kekuasaan Orde Baru berakhir, Polri ikut bereformasi, antara lain sebagai implementasi atas adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan MPR no 6 dan no 7, serta yang utama adalah Undang-undang No 2 tahun 2002. Dalam undang-undang itu, 1 Juli dikukuhkan serta ditetapkan bahwa Polri adalah sebuah keputusan nasional, dengan kedudukannya di bawah presiden,

berikut rincian tugas-tugas pokok dan wewenang Polri. UU No 2 tahun 2002 sebenarnya adalah landasan operasional reformasi Polri.

"Saat ini tahun 2007. Jadi sudah lima tahun umur dari undang-undang tersebut. Mana yang sudah dilaksanakan dan mana yang be-

lum, kita harus mengetahuinya," kata Dr Awaloedin Djamin. "Banyak tugas-tugas dan wewenang. Ada tiga tugas pokok, itu semua orang tahu. Yang belum diketahui adalah tugasnya yang banyak yaitu pada pasal 13 sampai pasal 19, adanya tanggung jawab- tanggung jawab



PERSPEKTIF

yang harus dilaksanakan tapi kurang dipahami.”

Menurut Dr Awaloedin Djamin, Polri harus benar-benar memahami tugas-tugasnya apa saja yang untuk kepentingan nasional, mana untuk Markas Besar, mana untuk Polda, mana yang Polwil, mana

yang Polres, dan seterusnya. Sebenarnya tugas itu sangat jelas, namun tidak ada yang melaksanakan.

Tentang Undang-undang mengenai Polri, ada pasal dan penjelasannya, harus dimengerti mengapa jadi seperti itu. Dengan demikian sekarang ini, Polri wajib mengadakan evaluasi, mana yang belum mampu dilaksanakan, dan mana yang tidak dilaksanakan sama sekali. Bertolakannya dari undang-undang tersebut.

Dr Awaloedin Djamin menekankan, jika mau bicara reformasi Polri, yang mendasar adalah struktur di Polri dulu. Tanpa reformasi struktural tidak bisa mencapai apa yang diharapkan dari Polri. “Sebagai contoh, walaupun sekarang ini kita sudah polisi sipil, tetapi tetap *military organize*. Punya tamtama, bintara, dan perwira. Ini masalah struktur yang belum benar, walau hal seperti itu tidak hanya di Indonesia.”

Sekarang ini yang terasa sulit adalah mewujudkan polisi sebagai bagian dari *cultural society*, sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Polri hari ini dan yang akan datang, mestinya adalah Polri yang berperilaku dan bersikap sebagai pelayan masyarakat, memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Itu namanya reformasi kultural. “Walaupun anggaran atau gaji kurang, bukan jadi alasan untuk melakukan penyelewengan,” katanya.

Terlepas dari masih banyaknya pembenahan yang harus dilakukan Polri, sejumlah prestasi Polri, menurut Dr Awaloedin Djamin, cukuplah ada yang bisa dibanggakan. Tentang perburuan melawan teroris misalnya, dunia memberikan pujian. Amerika saja belum bisa membongkar kejadian di WTC atau peristiwa 11 September. Tetapi Polri sudah membongkar Bom Bali I, Bom

Bali II, Bom JW Marriot, Bom Kedutaan Australia, Azhari, Abu Dujana, dan seterusnya.

“Dalam peringatan Polri kali ini, wajib semua orang mengadakan renungan, bagaimana masa lampau, bagaimana keadaan sekarang, dan bagaimana keadaan yang akan datang,” kata Dr Awaloedin Djamin.

KEMAJUAN SEBAGAI KONSEKUENSI

Dalam perspektif Jenderal Pol. Chaeruddin Ismail SH, MH – pengajar di Sespim dan Sespati, sejauh ini Polri telah mengalami kemajuan, baik dari segi personil maupun dari segi peralatan operasional dan kinerja. Namun perlu digarisbawahi bahwa kemajuan yang dicapai Polri masa kini tidak bisa dibandingkan ketika era sebelumnya. “Di zaman saya, jumlah polisi hanya sekitar 200.000-an. Sekarang ini sudah kini bertambah 100.000-an,” katanya. “Dari sisi pertambahan personil ini, Polri sudah mengalami kemajuan, meski sebenarnya angka itu belum mencukupi bila diukur dari segi perbandingan jumlah masyarakat yang harus dilayani.”

Demikian juga dengan kinerja Polri, juga tidak bisa dilihat polisi era dulu dengan era sekarang ini. Belakangan ini banyak orang mengkritik polisi, lantaran dianggap masih menganut paradigma lama. “Saya sendiri tak setuju dengan tuduhan seperti itu. Masyarakat harus diajak memahami Polri ke dalam konteks demokratisasi dan reformasi yang tengah berlangsung,” kata Chaeruddin Ismail SH, MH.

Berdasarkan paradigma sipil dari segi literatur dan nuansa yang berkembang pasca dipisahkannya TNI/Polri, secara teoritis dan hukum sebenarnya polisi sipil itu sesuatu yang dekat dengan rakyat. Oleh



karena itu mau tidak mau memang paradigma lama itu pun harus diubah. Apabila paradigma itu diubah, maka Polri pun akan menjadi pelindung nilai-nilai sipil. Guna mewujudkan Polri sebagai pelindung nilai sipil tentu seorang polisi juga perlu pemahaman apa itu yang disebut dengan nilai sipil.

"Nilai sipil adalah nilai warga sipil dan nilai kewarganegaraan," tutur Chaeruddin Ismail. "Bila kita berbicara dalam konteks bernegara, tentu ada yang disebut namanya kepentingan warga negara, aturan bernegara, dan hukum negara. Dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia, masih ada hukum agama yang juga harus dipatuhi. Kalau agama dipatuhi berdasarkan keyakinan, maka hukum dipatuhi melalui polisi. Dengan demikian, secara sistematis polisi sipil memiliki dua fungsi tugas yang harus diemban. Yaitu menjaga ketertiban dan menjaga tegaknya hukum."

Dalam menjaga nilai ketertiban, tugas polisi sipil diarahkan pada persoalan sosial yang bukan hukum. Dalam konteks ini, kalau ada polisi yang rajin menangkap-mangkap, jelas itu tidak benar dan sangat keliru, karena tindakan itu sudah di luar tugasnya. Sebaliknya, dalam rangka tugas menjaga tegaknya hukum, siapa pun yang melanggar hukum pidana harus ditangkap untuk dibawa ke pengadilan. "Dalam perspektif saya, tugas polisi ada dua. Yaitu memerangi kejahatan dan menjaga ketertiban," kata Chaeruddin Ismail.

Dalam menjaga ketertiban, polisi harus memiliki kesabaran dan mengayomi karena yang dihadapi bukan penjahat, tetapi masyarakat. Dalam hal ini, polisi tidak boleh menggunakan kekerasan, tapi lebih dituntut harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan rakyat. Berbeda dengan pelaksanaan tugas dalam memerangi penjahat. Karena yang diperangi adalah macam-macam kejahatan, maka digunakan cara berlapis, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Dalam menjalankan tugas ini, polisi malah

tidak boleh berwatak sabar dan dituntut harus belajar mengerti tipuan-tipuan penjahat, sehingga tidak mudah dibohongi oleh penjahat."

PATUT UNTUK DIBANGGAKAN

POLRI secara makro patut dibanggakan, karena dalam perjalanannya mampu berbenah dan mereformasi diri menuju arah yang lebih baik. Meski tidak sendirian, Polri paling tidak telah membuktikan mampu menjalankan tiga agenda pokok pembangunan nasional periode 2004-2009. Demikian perspektif Dirjen Imigrasi Irjen Pol (purn) M Basyir Barmawi.

Sebagaimana diketahui, Agenda Pembangunan Nasional 2004-2009 terdiri dari tiga agenda pokok, yaitu menciptakan aman dan damai, adil dan demokratis, serta mensejahterakan rakyat. Tiga Agenda Pokok Pembangunan Nasional itu tentu mewarnai Agenda pembangunan dan mewarnai pekerja kepolisian.

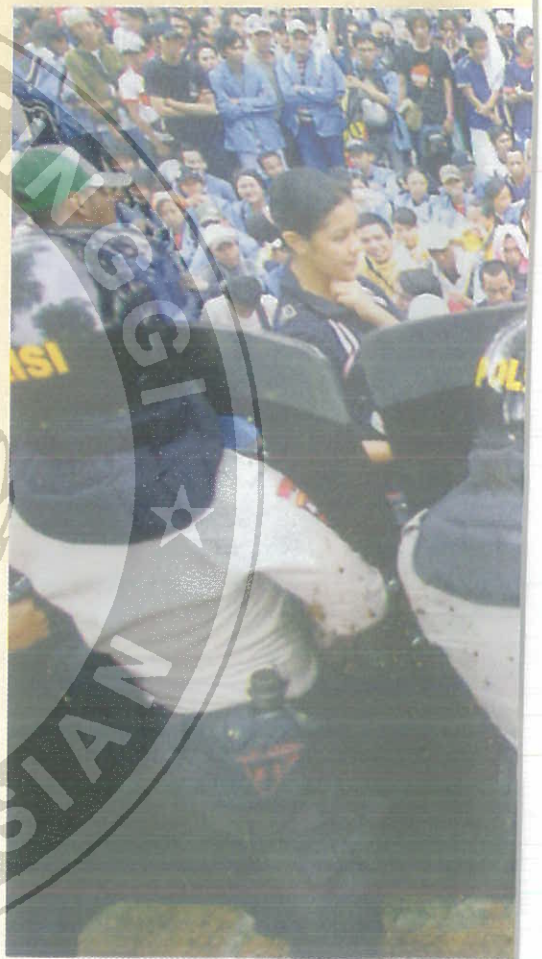
"Kalau kita berbicara aman tentu yang paling pokok adalah terciptanya kondisi aman dan damai di mana masalah-masalah besar, konflik misalnya berhasil ditangani oleh kepolisian," M Basyir Barmawi.

Meskipun konflik di masyarakat bukanlah masalah kepolisian sendiri, tapi esensinya Polri ikut berperan sebagai ujung tombak untuk menanganinya. Maka Polri harus memahami, aman dan damai yang seperti apa? Aman tentunya dalam pengertian tidak ada konflik.

Dalam hal menangani teroris, polisi terlihat total dengan upaya kuat sehingga keberhasilannya merupakan potret lain dari kepolisian kita. Keberhasilan itu ikut mewarnai dan mengisi Agenda Pembangunan 2004-2009. Upaya tak kalah gencar juga dilakukan dalam memerangi peredaran narkoba dengan hasil yang gemilang.

Dari segi adil dan demokratis, sebagaimana banyak disorot masyarakat, kiranya bisa dilihat dari pola-pola pembinaan yang diarahkan pada polisi yang bersifat jauh lebih demokratis dibandingkan era sebelumnya.

"Kepolisian sudah lebih dulu mereformasi dirinya," kata M Basyir Barmawi. "Polri kembali kepada jati dirinya. Dalam kaitan ini, saya pribadi berterima kasih pada pemerintah yang mendukung penuh dengan meniadakan semua hambatan-hambatan Polri waktu itu. Yaitu dengan memenuhi anggaran yang diperlukan, sekalipun secara bertahap."



Opsi pemerintah memenuhi anggaran, tentu setelah dipertimbangkan adanya kepentingan yang sangat kuat, yakni untuk penegakan hukum demi terciptanya kondisi aman dan damai. Dengan kata lain, opsi itu ada karena masyarakat yang terwakili oleh kepemimpinan pemerintah benar-benar melihat bahwa kepolisian membutuhkan bantuan itu. "Sekali lagi, di situ kita

melihat potret kepolisian yang berbenah, mereformasi diri, dan reformasi itu terus berjalan. "Sebagai mantan perwira tinggi di kepolisian, secara makro saya bangga dengan perjalanan itu."

Menurut M Basyir Barmawi, Polri sudah mencoba secara lebih fokus menciptakan suasana yang aman dan damai. Dari sini, mengarah pada terciptanya rasa keadilan, mewujudkan suasana demo-

menjalankan tugas-tugasnya, secara utuh pasti diwarnai oleh berbagai hal yang menjadi kompetensinya. Baik *knowledge*-nya, *skill*-nya, keterampilannya, maupun personalitanya. Berbagai perspektif akan terlihat banyak hal mempengaruhinya. Di antaranya kehidupan kota dan kesejahteraan. Pendapatan boleh sama, namun hidup di Jakarta tentu berbeda dengan tempat lain. Hal tersebut termasuk faktor-faktor

media dalam membentuk atau membangun sebuah opini besar sekali.

Data penyimpangan ini memang ada meskipun prosentasenya kecil bila dibandingkan dengan jumlah polisi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi apa pun, perlu diperhatikan sekaligus perlu dilakukannya perbaikan-perbaikan. Tentu tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan atau dengan ilmu sulap, tapi dilakukan secara berjenjang dan bertahap. Yang terpenting adanya konsistensi dalam menjalankan program-program perbaikan itu.

Kebijakan pimpinan yang mengharuskan rekrutmen Akpol dari S1 dan Bintara dari SMA, merupakan salah satu upaya perbaikan di tubuh Polri, khususnya yang berkaitan dengan kualitas SDM. Kebijakan ini diambil dengan sebuah pertimbangan yang matang karena institusi memang membutuhkannya. PTIK yang dianggap sebagai satu percepatan untuk memberikan kualitas S2 masih membutuhkan yang berkualitas setingkat S1. Kebijakan ini juga pasti sudah dilakukan dengan analisis tertentu.

Masyarakat sekarang makin kritis. Polisi harus mengimbanginya pula. Bila Polri hanya memiliki orang-orang yang berwawasan rendah dengan kemampuan terbatas, bagaimana bisa influence pada masyarakat. Contoh, untuk menerapkan program *community policing* yang mengedepankan kemitraan dengan masyarakat. Untuk sebuah daerah yang memiliki *level education* rendah, memang polisi yang memimpin. Tapi di kota besar seperti Bekasi, *community policing* sudah bisa dipimpin oleh masyarakat sendiri. Polisi bersifat *tut wuri handayani*.

"Dari 340 ribu polisi yang ada di Indonesia, kita bias lihat kualitasnya, *level education*-nya bagaimana, masyarakatnya berkembang sejauh mana," kata M Basyir Barmawi. "Kalau masyarakat menuntut kualitas polisi harus ditingkatkan ya kita penuhi. Tapi selama masih bisa ditanggulangi dengan lini-er, ya lini-er saja. Artinya dengan ke-



kratis dan mempersiapkan kesejahteraan, sekalipun kesejahteraan itu sendiri bukan diciptakan oleh polisi semata. Ada *disaster*, ada sejumlah penghambat. "Tapi *in-general* kita boleh bangga karena ada wadah kepolisian mengisi Agenda Pembangunan," katanya.

Masih ada potret yang lain. Polisi adalah manusia, di mana dalam menjalani kehidupannya, di dalam

deterent yang memungkinkan munculnya perilaku-perilaku menyimpang. Ini berlaku bukan di kepolisian saja tapi bisa di tempat lain.

Mereka yang memiliki perilaku menyimpang itulah yang disebut oknum. Oknum ini akan selalu ada di setiap kehidupan dan celakanya sering menjadi berita besar di media. Pengaruh sebuah

mampuan seadanya, kemampuan yang kita miliki."

TAK CUKUP PENGAWASAN INTERNAL

Setelah reformasi, sudah banyak kemajuan ditunjukkan Polri, terutama yang berkaitan dengan penanganan masalah yang bersifat nasional. Paling menonjol adalah terorisme, kedua masalah konflik-konflik. Kasus-kasus pidana, terutama yang dapat merugikan Negara, juga mampu disikapi oleh Polri, misalnya penyelundupan BBM dan illegal logging.

"Semuanya itu tidak lepas berkat perhatian negara atau dukungan pemerintah dalam memberikan dana dan logistik bagi Polri," komentar mantan Gubernur Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Irjen (purn) Pol Prof Dr. Farouk Muhammad.

Dana Polri dalam beberapa tahun meningkat empat sampai lima kali dari jumlah sekitar Rp 4 triliun pada awal tahun 2000-an. Sekarang sudah hampir 20 triliun. Kita melihat dana-dana itu banyak diarahkan untuk kebutuhan operasional, transportasi, komunikasi dan pendidikan. Saat ini lembaga pendidikan banyak mendapatkan perhatian. "Itu dari segi hardware. Dari segi organisasinya, struktur juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan baru," kata Farouk Muhammad.

Menurutnya, dari segi *software*, juga banyak peningkatan. Baik dalam bentuk program-program pendidikan pelatihan oleh Polri, maupun pelatihan melalui bantuan-bantuan internasional. Secara keseluruhan terdapat kemajuan yang signifikan. Namun kemajuan yang signifikan itu nampaknya masih belum mampu meminimalisasi keluhan-keluhan masyarakat atas pelayanan kepolisian.

"Saya melihat pelayanan kepolisian itu ada dua aspek, satu yang bersifat individual dan yang bersifat publik," kata Farouk Muhammad. "Pelayanan bersifat publik siapa pun bisa menikmati, seperti patroli, penjagaan, dan sebagainya. Pelayanan yang bersifat individual, ini yang banyak dikeluhkan

warga, terutama yang berkenaan dengan penggunaan otoritas atau wewenang kepolisian dalam penegakkan hukum. Lebih khusus lagi yang menyangkut pelanggaran hukum, atau tindak pidana yang melibatkan uang atau materi."

Paling tidak, keluhan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang menyalahgunakan kekuasaan terhadap penanganan perkara-perkara yang termotivasi uang, belum terminimalisasi. "Tahun 2005, saya melakukan survei di sepuluh kota, akibat kebijakan keras pemerintah khususnya baik dalam menindak pungli dalam lingkungan Polri, termasuk judi dan pungli dengan tindakan keras, itu terjadi kemerosotan penghasilan dari satuan Polri, antara 15 sampai 80 persen dari satuan operasional, mulai dari Polsek sampai Polda," tutur Farouk Muhammad.

Ada korelasi di satu pihak atas kebijakan menindak pungli maupun perjudian, hal itu bagus karena membawa manfaat yang positif. Tapi ternyata ada side efek yang membingungkan, dalam hal mengatasi kekurangan dana dengan memanfaatkan perkara-perkara itu.

Orang mengatakan aspek sistem pendidikan berperan. Kebutuhan untuk menata ulang sistem pendidikan perlu secara komprehensif.

Persoalannya, mereka yang mendi-dik polisi-polisi baru pada umumnya adalah orang-orang lama. Paradigmanya walaupun secara formal kita sudah beriklan pengetahuan, tapi behaviornya masih memerlukan waktu untuk mengubahnya. Ini masalahnya. Secara keseluruhan kebutuhan system pendidikan itu tetap ada, namun tidak langsung terkait dengan sikap dan perilaku menyimpang polisi yang menyalahgunakan kekuasaan.

Menurut Farouk Muhammad, itu lebih pada masalah moral. Program pendidikan perlu menekankan aspek-aspek pembinaan dan pembangunan moral. Beberapa langkah sudah dilakukan oleh PTIK, antara lain melalui kerjasama dengan komunitas pesantren Darul Tauhid. Tapi itu baru pada level perwira. Pada level bawah belum ada. "Saya tidak mengatakan bahwa dengan membangun dan membina moral ada jaminan. Karena ada faktor lain yang ikut mempengaruhi. Termasuk faktor sosial masyarakat, cukup berpengaruh sikap dan perilaku polisi."

Masalah sistem, menurut Farouk Muhammad, juga membuka peluang bagi digunakannya diskresi yang kotor. Jadi diskresi terlalu besar karena belum adanya aturan main atau yang disebut *law enforce-*



ment policy untuk mengendalikan diskresi.

PTIK pernah melakukan suatu studi, mengembangkan suatu konsep untuk mengendalikan diskresi, penahanan. Namun implementasinya tidak ketahuan. Begitu pun masalah pengawasan. Pengawasan internal kita tak bisa terlalu berharap. Sudah jadi dalil umum dalam studi kepolisian, bahwa kepolisian adalah suatu profesi yang tingkat solidaritasnya cukup tinggi setelah militer. Jadi kita tidak boleh benar-benar mengharapkan efektifitas dari pengawasan internal. Ini berarti kita membutuhkan pengawasan eksternal.

TERPENTING PROFESIONALISME

"Kalau saya melihat perkembangan polisi dari tahun ke tahun, dari pimpinan yang satu ke pimpinan yang lain, melihatnya harus secara utuh. Baik dari aspek personelnnya, alat pendukungnya, sarana dan prasarana, anggaran, maupun profesionalismenya," demikian dikemukakan mantan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol (purn) Nugroho Jayusman. "Polri dari masa ke masa sudah mengalami perkembangan yang bagus sekali. Aspek personalianya dari tahun ke tahun makin banyak, peralatan dan perlengkapannya juga makin modern menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Begitu pun pola dan metodenya."

Menurut Nugroho Jayusman, yang paling penting adalah profesionalisme. Ini bisa diukur dari tingkat keberhasilannya. Kita lihat dari kasus-kasus terorisme yang bisa diungkap. Itu merupakan hasil yang sangat signifikan, sebab masalah terorisme bukan hanya masuk ke wilayah nasional tapi juga wilayah internasional. Artinya Polri termasuk ikut membantu dan menjaga ketertiban keamanan dalam kehidupan masyarakat internasional. Kita juga bisa lihat kasus-kasus lain seperti perbankan, korupsi, juga kasus kriminal yang sifatnya sebagai dampak dari kondisi krisis multi dimensi, di mana kejahatan dengan menggunakan



peralatan canggih. Semuanya diikuti oleh profesionalisme Polri.

Di setiap hal, perubahan mengarah ke yang positif walaupun di sana-sini masih ada kekurangan-kekurangannya. Seperti dalam kasus penembakan di Semarang, bunuh diri, penembakan sesama anggota. Potret kecil dengan warna 'kelam' seperti itu, menurut Nugroho Jayusman, penyebabnya sangat pragmatis, yaitu masalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu bisa berkaitan dengan kenaikan pangkat, jabatan, menyangkut kebutuhan keluarganya. "Gaji polisi itu sangat rendah. Padahal biaya hidup sekarang ini sangat tinggi, terutama di Jakarta."

Maka menurut Nugroho Jayusman, seorang pemimpin harus tahu

setiap persoalan dari organisasi yang dipimpinnya. Siapa saja, apakah itu presiden dia juga harus tahu permasalahan rakyatnya. Polisi juga selain mengetahui permasalahan anggotanya, juga permasalahan rakyat yang diayominya. Memberikan perlindungan, memberikan pengamanan. Apa yang jadi permasalahan rakyatnya. Diperlukan adanya kedekatan pimpinan dengan bawahan. Hubungan yang akrab, tanpa menghilangkan hierarki di internal organisasi.

Rakyat harus didekati bukan dijauhi. Rakyat tidak akan berani mendekati polisi. Yang berani mendekati polisi hanya rakyat yang memiliki masalah. Jadi harus pro aktif maju ke depan. Sekarang dengan kebijakan Kapolri dalam com-

munity policing, konsepnya adalah kemitraan. Namun dalam prakteknya, metodenya, cara bertindakannya, polisi harus proaktif. "Contoh, kalau masyarakat di wilayah Polsek tertentu tidak mengenal siapa Kapolseknya, berarti si Kapolsek ini gagal membangun kemitraan dengan masyarakat," katanya.

Setelah dikenal masyarakat, institusi polisi harus dijadikan sebagai wadah yang disegani, bukan ditakuti. Salah kalau menggunakan cara-cara seperti dulu. "Seperti kata Pak Anton Sudjarwo, polisi itu jangan seperti orang yang berkumis tebal, njaplang. Jangan jadi sosok yang menakutkan. Polisi jangan seperti 'paku yang kalau diketok baru jalan'. Harus penuh inisiatif, pro-aktif. Dengan prinsip tadi, diimbangi dengan pendidikan yang bagus, metode pendidikan yang bagus, polisi akan benar-benar men-

jadi professional."

Bicara soal kesejahteraan, polisi tidak bisa melakukan sendiri tapi butuh dukungan, seperti dari DPR misalnya. DPR melihat kepentingan Polri tadi harus memberikan dukungan jangan hanya menjadikan polisi untuk kepentingan politik karena itu berbahaya bagi Polri sendiri. Jadi profesionalisme harus benar-benar dilaksanakan. Membangunnya, selain lewat pendidikan, juga melalui *learning by doing*. Belajar sambil berbuat. Berbuat merupakan suatu pelajaran juga. Ada yang melalui metode pendidikan jalur biasa, maupun pendidikan professional, juga penugasan biasa. Penugasan juga merupakan sebuah pembelajaran. Itu harus dilakukan karena kalau kita menunggu waktu untuk memperoleh pendidikan repot. Karena terkait dengan berbagai hal seperti ang-

garan.

Di sini peran komandan sangat menentukan. Seorang komandan adalah pemimpin, bapak, guru dan teman. Dia harus mengerti apa yang jadi kebutuhan anak buahnya. Dia harus lebih aktif sehingga hubungan dengan anak buah tak kaku. Polisi bukan militer.

Menurut Nugroho Jayusman, Polri juga sudah melakukan banyak reformasi di berbagai bidang, antara lain peralatan, perlengkapan, metode, sistem, juga kebudayaan. "yang paling sulit adalah reformasi di bidang budaya, yang tadinya militer menjadi sipil. Hal ini perlu disadari masyarakat. Jangan hanya jadi *excused* polisi saja. Jangankan polisi, orang sipil saja kalau dikasih baret, pakaian dengan uniform yang sama, akan lebih galak dari militer.

[Cecilia E Murwani]

